

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN BELITANG HULU PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010**

Fransiskus
NIM: E 02109001

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: manyunpatih@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Kabupaten Sekadau pada tahun 2010 yang membawa perubahan bagi proses demokratisasi di tingkat lokal, terutama peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas politik dalam pemilihan. Peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu ini cukup menarik untuk diteliti, karena masyarakat sangat berperan aktif dalam berpolitik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Adapun pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu pada Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2010 terlihat keterlibatan langsung dalam keikutsertaan masyarakat pada proses kegiatan partisipasi voting (pemberian suara di TPS), kampanye, aktivitas komunal, kontak individu.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Politik, Pilkada

ABSTRACT

The writing of this article aims to provide an understanding of community participation in the implementation of regional head election (Elections) directly in Sekadau Regency in 2010 brings changes for the process of democratization at the local level, especially the increased participation of community in district politics Belitang upstream. Both in terms of quality as well as quantity of politics in the election. Increased public participation in district Belitang Upstream is quite interesting to people because of the greatly scrutinized, plays an active role in politics. The methods used in this research is descriptive-qualitative method. As for the data retrieval is performed with in-depth interviews. The result of this research was known that the public participation in sub-district belitang hulu in the district sekadau 2010 visible direct involvement in the participation of the people in the process of activities participation voting (votes in the polling stations TPS), granting votes in the campaign, the activity of communal, contact individuals.

Keywords: Democracy, Political Participation, Election

A. PENDAHULUAN

Dalam partisipasi politik diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik, oleh karena itu partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara, dapat pula disajikan sebagai indikator yang menunjukkan

kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan mensukseskan kegiatan politik. Pilkada langsung merupakan sarana yang paling tepat digunakan oleh masyarakat saat ini, guna menyeleksi calon-calon pemimpin yang mampu membawa perubahan, kemajuan, dan perkembangan bagi daerah dan masyarakatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam

kegiatan pilkada dapat menjadi kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan, manakala masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab mampu mengamati visi dan misi kandidat Kepala Daerah ketika menyampaikan program kampanye, dengan mengetahui latar belakang riwayat hidup kandidat, sampai pada memutuskan calon Kepala Daerah yang akan dipilih. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis tingginya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2010 di Kabupaten Sekadau.

Penelitian ini menarik untuk dianalisis karena pelaksanaan pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah berlangsung dari tahun 2005, dan tahun 2010 yang untuk kedua kalinya di Kabupaten Sekadau dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemilihan langsung ini akan dilihat bagaimana partisipasi masyarakat pemilih terhadap Pilkada 2010 yang sudah dilaksanakan. Pada partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang Hulu dalam pemberian suara ditempat pemungutan suara (TPS) Pada dua pilkada yang telah dilakukan di Kabupaten Sekadau tahun 2005 dan 2010 mengalami kenaikan juga yang sangat signifikan. Pada pilkada tahun 2005, dari 10.390 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Belitang Hulu sebanyak 9.620 (92,58%) yang menggunakan hak suaranya. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2010. Dari 13.620 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 13.355 (98,18%) menggunakan hak suaranya di TPS. Artinya ada kenaikan partisipasi dalam pemberian suara dari 92,58% pada Pilkada 2005 menjadi 98,18% sehingga bisa ditafsirkan jika dipersenkan menjadi 5,60% tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2010.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Belitang Hulu pada pelaksanaan Pilkada 2010 tidak terlepas juga dari rasa persaudaraan dan keinginan untuk mendukung anggota kelompoknya menduduki jabatan politik. Pemilihan kepala daerah dapat kita pandang sebagai fenomena dari bentuk primordialisme politik yang berdasarkan faktor-faktor etnisitas daerah dengan berbagai respon telah mendorong peneliti melihat antara fakta dan isu yang telah terjadi sesungguhnya terhadap pengamatan. Penelitian memberikan suatu nilai berharga dimana masyarakat saling bahu-membahu dalam proses kegiatan pelaksanaan Pilkada.

Oleh karena itu dapat kita rumuskan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik dan apa faktor pendorong tingginya partisipasi politik pada masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sekadau Tahun

2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi politik dan mengetahui faktor pendorong masyarakat Kecamatan Belitang Hulu melakukan partisipasi politik terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2010. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik pemilihan umum dimana merupakan salah satu bentuk partisipasi konvensional (Surbakti, 1999: 142). Oleh karena itu, bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilihan umum memiliki bentuk yang jelas secara prosedural pelaksanaan partisipasi politik dalam pemilihan umum yang di kemukakan. Dimana masyarakat merupakan objek dan komunitas politik dengan demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah, KPUD, para elit partai politik dan masyarakat Kecamatan Belitang Hulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dipelajari terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Secara umum partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memiliki pimpinan negara. Dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau kebijakan publik (*public policy*). Di negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan. Jadi partisipasi politik pertanggungjawaban dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Budiardjo, 1998:3). Konsep ini menyatakan bahwa partisipasi politik menunjukkan kedaulatan ditangan rakyat, konsep ini sesuai dengan konsep negara demokrasi Indonesia, dimana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, dengan kaitan rakyat yang menentukan masa depan negaranya.

Dalam teori partisipasi politik, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi konvensional (Surbakti, 1999: 142). Oleh karena itu, bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilihan umum memiliki bentuk-bentuk yang jelas secara prosedural memiliki bentuk pelaksanaan yang jelas. Penjelasan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum di kemukakan oleh Rousseau

(dalam Budiyanto,2006:181) yang menggambarkan, keempat bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Voting adalah kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum dan merupakan bentuk partisipasi yang paling mudah dan murah biayanya untuk dilaksanakan oleh partisipan. Para pemilik suara hanya tinggal datang ke tempat pemungutan suara dan menjalani proses pemberian suara sesuai prosedur yang berlaku. Sah atau tidaknya suara yang diberikan oleh pemilik suara diatur dalam prosedur pemberian suara.
2. Terlibat dalam menyelenggarakan kampanye juga relatif mudah dilaksanakan walaupun menurut biaya, waktu dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan pelaksanaan voting. Kampanye sendiri merupakan bentuk komunikasi persuasif yang dirancang untuk mempengaruhi tindakan individu (Nimmo, 1970:9). Dapat pula dikatakan sebagai rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada jumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Rogers dan Storey, 2004:7)
3. Terlibat dalam aktivitas komunal dengan cara membentuk atau bergabung dengan berbagai organisasi yang bertujuan untuk menyalurkan partisipasi politiknya. Dengan bergabung dalam sebuah organisasi atau kegiatan komunal maka warga Negara tersebut telah melakukan partisipasi politik karena secara langsung atau tidak langsung akan terlibat dalam proses politik, di antaranya melalui menyampaikan aspirasi dalam diskusi yang dilakukan dalam organisasi atau kelompok komunal. Diskusi politik sendiri merupakan sebuah proses memperbincangkan secara kritis sebagai isu politik yang idealnya yang bermuara pada pemberian rekomendasi dan solusi tentang persoalan tersebut.
4. Kontak individu yaitu untuk komunikasi yang dibangun dengan pimpinan politik atau pejabat pemerintah yang dilakukan oleh partisipan dengan tujuan menyampaikan aspirasi atau sebagai bentuk dukungan partisipatif terhadap kandidat dalam pemilihan umum. Bentuk ini membutuhkan upaya yang cukup besar dari partisipan karena membutuhkan inisiatif yang tinggi untuk menghubungi

berbagai tokoh yang bersangkutan secara pribadi. Bentuk partisipasi ini sering mengalami hambatan ketika tokoh yang dimaksud sulit untuk dihubungi atau ditemui.

Sementara Scammon (1967:63-68) dengan lokus Amerika Serikat. Hasil penelitiannya memberikan indikator umum dalam pemilihan umum yang berlaku bukan hanya di Amerika Serikat tetapi juga diseluruh dunia, seperti halnya presentasi pemilih pria lebih tinggi dari wanita, ketidakpedulian generasi muda dalam partisipasi pemilihan umum, korelasi yang berbanding lurus antara tingginya partisipasi dengan pendidikan dan penghasilan seseorang dan letak geografis perkotaan yang memiliki lebih tinggi dari pada pedalaman dalam partisipasi politik pemilihan umum masyarakatnya (Scammon, 1967:63-68). Berdasarkan penelitian Scammon inilah banyak berkembang studi lebih lanjut tentang indikator partisipasi masyarakat, khususnya dalam pemilihan umum.

Selain model dan indikator pemilihan umum, konsep mobilisasi politik juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk dibahas dalam memahami partisipasi pemilihan umum. Konsep mobilisasi politik tidak hanya penting dalam menentukan partisipasi individu, tetapi juga dapat menjelaskan penurunan atau peningkatan partisipasi politik masyarakat secara umum (Kernell dan Jacobson dalam Goldstein dan Ridout, 2002:3-4). Rosenstone dan Hansen (dalam Goldstein dan Ridout, 2002:4) mengemukakan bahwa penurunan atau peningkatan partisipasi pemilih pada masyarakat sangat tergantung pada mobilisasi yang dilakukan oleh kandidat, partai, kelompok kepentingan atau gerakan sosial yang secara aktif memobilisasi masyarakat untuk memberikan suaranya. Kasus meningkatnya masyarakat yang tidak memberikan suara atau abstain yang terjadi di Amerika Serikat adalah contoh dari argumen tersebut. Melalui perbandingan pada pemilu di Amerika Serikat pada Tahun 1960 dan tahun 1980, didapatkan gambaran penurunan mobilisasi aktif sangat berpengaruh pada penurunan partisipasi pemilih masyarakat.

Penjelasan lain tentang pengaruh mobilisasi politik terhadap peningkatan atau penurunan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum juga terkait dengan kualitas komunikasi antara kandidat dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya kualitas komunikasi tidak tergantung pada kandidat saja, tetapi juga didukung oleh para sukarelawan yang dapat terdiri dari lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Hal yang menarik adalah bahwa teknologi

komunikasi yang berkembang saat ini, seperti jaringan telpon dan jaringan media lainnya seperti internet, justru menurunkan kualitas dan efektivitas komunikasi. Hal ini terjadi karena komunikasi yang dilakukan secara langsung dari orang perorang, seringkali memiliki kualitas komunikasi dengan dorongan kedekatan emosional antara komunikator, sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh komunitas melalui media jarak jauh (Goldstein dan Ridout, 2002:5).

Ketiga konsep yang telah diuraikan terdahulu, yaitu model partisipasi, indikator dan mobilisasi politik akan menjadi landasan penelitian dalam memahami peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu pada pemilihan Kepala Daerah Sekadau tahun 2010. Adapun aktivitas komunal adalah bentuk partisipasi yang memiliki dimensi kerjasama cukup tinggi, dan sebaliknya, bentuk partisipasi kontak perorangan, melalui loby atau koneksi pribadi, adalah bentuk partisipasi yang memiliki dimensi kerjasama yang rendah (Claggett dan Pollock, 2006-595). Dimensi dan bentuk partisipasi pemilihan umum yang di buat oleh Verba dan Nie (Claggett dan Pollock, 2006-595) inilah yang sering digunakan di berbagai negara untuk memperoleh data empiris tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Verba dan Nie (dalam Claggett dan Pollock 2006:593) menyatakan dimensi partisipasi pemilih masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis berbagai bentuk tindakan politik. Terdapat empat dimensi dalam partisipasi politik, yaitu:

1. Dimensi inisiatif (*initiative*), yaitu mengacu pada jumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk sebuah tindakan partisipasi dalam besarnya inisiatif dibutuhkan individual dalam memilih, kapan dan bagaimana harus melakukan tindakan partisipasi politik;
2. Dimensi cakupan hasil (*scope of outcomes*), yaitu mengacu pada berapa banyak masyarakat terpengaruh oleh tindakan politik;
3. Dimensi konflik (*conflict*), mengacu pada satu tindakan politik melibatkan kehadiran atau ketidakhadiran dari lawan partisipasi politik aktif;
4. Dimensi kerjasama (*cooperation*) yaitu mengacu pada apakah tindakan tersebut dilakukan secara individual atau melalui

interaksi dengan partisipan lain (Verba dan Nie dalam Claggett dan Pollock, 2006:593).

Berdasarkan dari asumsi dimensi politik di atas, maka tindakan politik dapat di strukturkan dalam model bentuk partisipasi yang berbeda. Verba dan Nie membagi bentuk partisipasi ke dalam empat bentuk, yaitu voting, kampanye, aktivitas komunal dan kontak individual (Claggett dan Pollock, 2006). Hubungan antar bentuk partisipasi dan dimensi politik inilah yang dapat mengidentifikasi derajat partisipasi politik, baik individu atau kelompok, dalam pemilihan umum dapat dijelaskan bahwa setiap bentuk partisipasi politik pemilihan umum memiliki dimensi yang berbeda dari yang lainnya. Voting dinyatakan sebagai bentuk partisipasi yang membutuhkan inisiatif yang paling rendah jika dibandingkan dengan kampanye, aktivitas komunal dan kontak individual. Kampanye sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, sehingga Verba dan Nie (dalam Claggett dan Pollock, 2006-595) membedakannya dalam bentuk dimensi kerja sama tinggi, seperti penggalangan dana atau bekerja pada sebuah partai, dan kampanye yang memiliki dimensi kerjasama rendah seperti menjalin hubungan politik melalui jamuan makan malam tertentu.

Adapun aktivitas komunal adalah bentuk partisipasi yang memiliki dimensi kerjasama cukup tinggi, dan sebaliknya, bentuk partisipasi kontak perorangan, melalui loby atau koneksi pribadi, adalah bentuk partisipasi yang memiliki dimensi kerjasama yang rendah (Claggett dan Pollock, 2006-595). Dimensi dan bentuk partisipasi pemilihan umum yang di buat oleh Verba dan Nie (Claggett dan Pollock, 2006-595) inilah yang sering digunakan di berbagai negara untuk memperoleh data empiris tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Pelaksanaan Pilkada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno (2002: 11) mengatakan bahwa: "sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih". Sementara menurut Bambang Purwoko (2005: 10) menjelaskan bahwa: "Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya

kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Menurut Agung Djokosukarto (2003:33) ,ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu:

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
2. mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)
3. mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif - yakni menggambarkan dan menerangkan berbagai komponen tentang situasi sosial suatu objek dan subjek penelitian, yaitu mengenai partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang Hulu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sekadau 2010. Menurut Bogdan dan Taylor, (dalam Moleong 2000:3), mengidentifikasi “ metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Berdasarkan pendapat tersebut metode kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari data-data dalam bentuk: (a) Tulisan-tulisan atau dokumen. (b)

Lisan atau hasil wawancara langsung dengan para informan dan.(c) Prilaku yang diamati atau kondisi objektif di lapangan penelitian.

Subjek penelitian sebagai berikut: a). Ketua KPUD Kabupaten Sekadau, b). Ketua PPK Kecamatan Belitang Hulu, c). Tokoh masyarakat (kepala adat, agama, kepala desa), birokrat dan akademisi, d). Tokoh Pemuda, e). Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu yang berada di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara (*Guidence Interview*), kamera dan buku catatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dilakukan secara menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, serta melalui tiga komponen diantaranya: Reduksi data, display data, verifikasi data (Kesimpulan).

D. PEMBAHASAN

Partisipasi politik masyarakat mempunyai fungsi penting dalam suatu pemerintahan, karena tanpa partisipasi politik masyarakat penyelenggaraan pemilihan tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi akan terbentuk apabila ada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang diberikan oleh pemerintah, tanpa adanya masyarakat kegiatan dan rencana yang diberikan pemerintah tidak akan berjalan lancar. Pada partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat benar-benar memilih pemimpin untuk memimpin Kabupaten Sekadau. Kegiatan partisipasi politik masyarakat ini merupakan suatu aspirasi masyarakat untuk memilih. Oleh karena itu terbentuk partisipasi politik masyarakat secara sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan partisipasi politik ini dikarenakan masyarakat ingin diikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah.

1) –**Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010**

1.1. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu melalui Kampanye

Dalam Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2010, proses kampanye dilakukan selama satu bulan. Selama proses kampanye, keterlibatan aktif tidak hanya ditunjukkan oleh tim kampanye dari kandidat

dan partai politik pendukung saja, tetapi juga dari kalangan masyarakat yang secara sukarela ikut terlibat langsung dalam proses kampanye tersebut. Dalam masa kampanye ini muncul fenomena pembentukan tim kampanye yang bertujuan untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Setiap masing-masing pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tim kampanye, kegunaan dari tim kampanye ini yaitu untuk mensukseskan kegiatan kampanye Pilkada. Tim kampanye merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyusun dan menjalankan strategi dalam rangka kemenangan pasangan calon. Tim kampanye bertujuan untuk membantu penyelenggaraan kampanye, yang tujuan akhirnya akan bermuara pada kesuksesan bagi kemenangan pasangan calon kandidat. Secara umum kampanye Pilkada Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan terbilang cukup lancar, aman dan terkendali serta kegiatan kampanye berlangsung lebih semarak. Kampanye Pilkada bupati dan wakil bupati Sekadau 2010 yang lalu juga menjadi ajang media massa untuk menginformasikan berita mengenai para kandidat. Masing-masing media memiliki gaya dan kecenderungannya masing-masing dalam mengungkapkan berbagai sisi berita kepada pembaca, ada yang datar, kritis, bahkan provokatif. Dalam melakukan kampanye, masing-masing kandidat juga menggunakan berbagai macam strategi untuk memenangkan Pilkada.

Inisiatif pada bentuk partisipasi kampanye merupakan bentuk partisipasi aktif yang dilakukan oleh kandidat atau tim pendukung kandidat melalui penyampaian visi dan misi. Materi atau bahasan visi dan misi secara umum mencakup isu-isu dasar yang dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat. masing-masing kandidat mempunyai metode kampanye yang berbeda. Dalam hal ini para kandidat mempunyai inisiatif dalam melakukan strategi kampanye yang dilakukan seperti melakukan pertemuan dan silaturahmi, kunjungan ke desa-desa dan kelurahan dalam rangka sosialisasi komunikasi politik untuk mengenalkan figure dan membangun dukungan secara politis. Dalam mencari dukungan secara politik untuk memenangkan salah satu calon kandidat dalam Pilkada, tim sukses yang dibentuk dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator tetapi dalam pelaksanaannya yang diperankan secara optimal adalah partai politik, hal ini dimaksudkan supaya tugas tersebut dapat berjalan secara efektif, dan tidak terlepas juga peran media massa guna mempublikasikan visi dan misi calon kandidat dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon

pada saat kampanye. Hasil pada bentuk partisipasi kampanye merupakan , hasil dari kerjasama dalam melakukan hasil yang di peroleh yang di lakukan oleh tim sukses maupun simpatisan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Sekadau tahun 2010. Dari hasil ini maka terbentuklah kepuasan terhadap tim yang mensukseskan kemenangan calon kandidat. Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, aktivitas komunikasi kampanye yang dilakukan oleh kandidat, tim sukses ataupun para sukarelawan mengandung empat tujuan utama, yaitu (1) tindakan kampanye yang ditunjukkan untuk mendapatkan dukungan politik; (2) Berupaya untuk mengumpulkan massa sebanyak mungkin dalam upaya kampanye-kampanye terbuka;(3) dilakukan pada yang telah ditentukan KPUD Sekadau;(4) Melakukan serangkaian komunikasi dengan massa secara terbuka berupa pidato yang seringkali disisipi hiburan berupa petunjukkan musik dan kesenian daerah yang menjadi selingan agar massa tidak bosan dalam mendengarkan pidato kampanye. Konflik pada bentuk partisipasi kampanye politik di sebabkan oleh kampanye hitam (*black campaigning*) dan penggunaan bahasa dari enis tertentu yang menyinggung perasaan dari salah satu kelompok lain. Konflik dalam partisipasi kampanye selalu menggunakan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam (*black campaigning*) umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. Kerjasama dalam bentuk kampanye biasanya dilakukan untuk simpatisan yang mana kegiatannya dilakukan secara sukarela dan kampanye terbatas dengan bentuk kampanye ini tidak secara terbuka hanya segelintir masyarakat, tim sukses dan para sukarelawan yang mendukung calon kandidat. Hasil dari bentuk kampanye terbatas sangat efektif dalam membangun komunikasi karena memberi ruang gerak yang lebih luas jika di bandingkan oleh kampanye terbuka karena masyarakat dapat untuk mendiskusikan pandangan-pandangan terutama yang berkaitan dengan visi dan misi pada calon kandidat.

1.2. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu melalui Aktivitas Komunal

Bentuk lain yang dilakukan partisipan dalam kampanye Pilkada di kecamatan belintang hulu tahun 2010 adalah aktivitas komunal. Aktivitas komunal dilakukan partisipan dengan ikut bergabung dengan organisasi sayap partai politik, atau organisasi adat yang bertujuan untuk mendukung salah satu calon kandidat, yang sekaligus menjadi saluran politik dalam menyampaikan aspirasinya. Aktivitas komunal pada dasarnya merupakan tindakan politik yang di kembangkan melalui masyarakat yang ikut berpartisipasi langsung maupun aktif atau tidak aktif sebagai tim sukses salah satu calon kandidat. Pada masyarakat Kecamatan Belintang Hulu aktivitas komunal yang lakukan masyarakat sangat efektif seperti melakukan mobilisasi masa untuk mendukung calon kandidat yang mereka anggap dapat menampung aspirasi masyarakat. Inisiatif pada bentuk partisipasi aktivitas komunal pelaksanaan partisipasi politik dapat dilihat dengan jelas melalui aktivitas-aktivitas politiknya, begitu juga dalam masyarakat dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama oleh masyarakat di Kecamatan Belintang Hulu masing-masing kandidat mempunyai metode untuk meobilisasi masa dengan dengan berinisiatif dalam bentuk berdiskusi politik. Berdasarkan pengamatan dilapangan dari berbagai sumber informan Inisiatif pada bentuk partisipasi aktivitas komunal yang membawa arti daya usaha atau gerak masyarakat dalam ikut serta dalam kegiatan organisasi politik dalam hal ini ada dua tingkat inisiatif yang di lakukan masyarakat Kecamatan Belintang Hulu (1) Inisiatif yang relatif tinggi dimana pada individu-individu yang menginisiasi aktivitas komunal pada masyarakat aktif dalam ikut serta orngnisasi politik serta diskusi politik maupun dialog yang di sampaikan calon kandidat dimana apa yang disampaikan oleh calon kandidat dapat menjadi bahan acuan untuk memilih calon kandidat tersebut. (2) inisiatif yang relatif rendah pada individu yang hanya menghadiri aktivitas komunal tersebut (verba dan Nie dalam Clagget dan Pollock, 2006:595) dimana masyarakat Kecamatan Belintang Hulu. Pada masyarakat Kecamatan Belintang Hulu inisiatif menyediakan suatu cara di mana suatu tindakan masyarakat berperan aktif dalam kegiatan partisipasi politik.

Hasil pada bentuk partisipasi aktivitas komunal merupakan proses kedua dalam mobilisasi politik (proses pembentukan komunitas). Pada masyarakat di Kecamatan Belintang Hulu hasil pada bentuk aktivitas komunal terwujud dalam bentuk sebuah komunitas, kebanyakan mereka adalah bagian dari grup/kelompok tertentu, dan memiliki lingkaran pertemanan tertentu. Hasil pada aktivitas komunal

masayarakat Kecamatan Belintang Hulu ini tercipta bukan tanpa alasan. Hal ini bisa terwujud karena adanya kepentingan masyarakat terhadap calon kandidat yang di dukungnya. Hasil dalam aktivitas komunal bisa bermakna tetap bersama-sama dalam keadaan sedih maupun senang, bersama-sama dalam berjuang, dan saling bergantung satu sama lain. Konflik pada bentuk partisipasi aktivitas komunal dimasyarakat Kecamatan Belintang Hulu terhadap perbedaan pendapat dalam memilih suatu calon kandidat yang diusungnya memang ada sedikit perbedaan pendapat, namun pada dasarnya setiap kelompok yang melakukan diskusi tidak sampai berujung terjadi konflik yang berujung kekerasan, melainkan melauli perdebatan saja hal ini tercermin sikap masyarakat yang paham terhadap proses demokrasi. Kemudian dimensi inisiatif berasal dari mobilisasi vertikal yang dilakukan oleh partai politik atau tim kampanye kandidat, terbukanya sarana informasi dan transportasi, program-program yang ditawarkan kandidat, figur kandidat, serta pengaruh dari tokoh-tokoh masyarakat. Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya dalam menganalisis peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Belintang Hulu dalam Pilkada Kabupaten Sekadau 2010 adalah dimensi kerjasama. Bentuk dimensi ini adalah kerjasama yang bersifat vertikal maupun horisontal. Kerjasama vertikal berbentuk hubungan baik yang dijalani antara kandidat dengan pemilih. Dalam hal ini berapapun jumlah kandidat yang akan berlaga dalam Pilkada, pemenang akhir tetap satu pasang yang merupakan suara terbanyak yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pilkada. Terdapat proses untuk dapat tampil menjadi pemenang Pilkada. Diantara proses itu, akan bersinggungan dengan kepentingan pihak lain.

Kerjasama pada bentuk partisipasi aktivitas komunal dukungan bersifat komunal yang diberikan oleh berbagai organisasi masyarakat di Kecamatan Belintang Hulu merupakan inisiatif sukarela dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung salah satu kandidat, dalam hal ini kandidat yang berasal dari Kecamatan Belintang Hulu. Adapun hal yang mendorong munculnya rasa kerjasama tersebut adalah (1). Secara subjektif dukungan berdasarkan perasaan komunal yang muncul terhadap kandidat yang didukungnya (2). Kesadaran untuk berpartisipasi dalam politik sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk sukarela berpartisipasi mendukung kandidat putra daerah atau kandidat yang memiliki program sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

1.3. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu Melalui Kontak Individu

Kontak individu merupakan salah satu bentuk lobi politik untuk mempengaruhi tokoh atau meminta tokoh yang bersangkutan untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat. Dalam Pilkada Kabupaten Sekadau 2010 terdapat beberapa bentuk kontak individu yang dilakukan oleh kandidat, tim sukses ataupun yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat untuk mendukung kemenangan kandidat tertentu.

Dari semua bentuk partisipasi politik, mengadakan kontak individual menunjukkan hubungan yang paling jelas, langsung dan biasanya segera antara tindakan dan hasilnya. Bentuk-bentuk partisipasi lainnya membuahkan hasil-hasil yang seringkali tidak pasti, diperoleh setelah lewat suatu jangka waktu tertentu dan secara bercampur-baur (*diffused*). Tidak ada seorang pun partisipan yang bisa merasa pasti bahwa tindakan akan membuahkan hasil yang pada umumnya dikehendaki, atau apakah dan kapan ia secara pribadi akan memperoleh manfaatnya. Meskipun usaha mengadakan kontak itu mungkin memerlukan banyak inisiatif dan keuletan, namun diperkirakan bahwa orang-orang yang berprestasi rendah lebih sering melakukan kegiatan itu daripada bentuk-bentuk partisipasi lainnya.

Kontak individu yang dilakukan oleh seseorang partisipan memiliki dimensi inisiatif yang tinggi karena dibutuhkan jaringan atau hubungan tertentu tokoh politik untuk mendapat dukungannya. Inisiatif untuk menghubungi tokoh politik atau tokoh masyarakat dapat dilakukan oleh kandidat, tim kampanye, atau oleh partisipan yang mendukung kandidat tertentu. Bentuk kontak individu kandidat atau partisipan dengan para tokoh ini, dilakukan secara langsung atau melalui jejaring politik atau kekeluargaan. Pada pemilihan kepala daerah Sekadau 2010, kontak individu yang yang dipakai untuk mendukung salah satu kandidat antara lain, tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh akademisi, dimana mereka dikontak secara langsung oleh semua kandidat karena dianggap kompeten dan berpengaruh dikalangan masyarakat. Dari kalangan masyarakat Kecamatan Belitang Hulu terdapat beberapa tokoh yang berhasil dikontak oleh kandidat, yang kemudian menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan preferensi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, didapati bahwa tokoh politik ataupun tokoh masyarakat memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya partisipasi politik masyarakat, terlepas kepada siapa preferensi politik tokoh masyarakat itu

disalurkan. Adapun tokoh-tokoh yang berhasil ikontak oleh partisipan dalam upaya mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat antara lain: a. tokoh politik, b. tokoh adat, c. tokoh agama, d. tokoh akademisi.

1.4. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu Melalui Voting.

Partisipasi politik masyarakat yang paling rendah adalah bentuk partisipasi voting atau pemberian suara karena hanya menuntut keterlibatan minimal dari pasrtisipan. Dalam melaksanakan voting yang bersifat sangat individual ini, pemilihan masyarakat Kecamatan Belitang Hulu datang ke TPS-TPS secara sukarela, mereka memilih berdsrkan penilaian-penilaian objektif melalui proses yang panjang dengan mengikuti kegiatan kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh kandidat, tim kampanye, tokoh masyarakat. Voting atau pemberian suara dalam pemilihan umum digambarkan sebagai bentuk partisipasi politik paling rendah karena dalam voting, inisiatif keterlibatan pemilih hanya ditunjukkan melalui proses pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai salah satu bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Belitang Hulu, voting memiliki sifat yang sangat individual sehingga pemilih seseorang pada saat melakukan penjoblosan tidak memiliki pengaruh terhadap preferensi pilihan individu lainya karena sifatnya yang bebas dan rahasia dapat dikatakan bahwa voting sebagai salah satu bentuk partisipasi pemilihan umum yang memiliki dimensi kolektif, karena outputnya diketahui setelah pencoblosan dilakukan.

Pada dimensi cakupan hasil dalam bentuk partisipasi voting, dimana dimensi tersebut menggambarkan keberhasilan dari pelaksanaan voting, baik dari hasil akumulasi suara yang diperoleh kandidat, ataupun gambaran antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi memberikan suara. Pada Pilkada di Kabupaten Sekadau 2010, dimensi cakupan hasil di kalangan masyarakat Belitang Hulu menunjukan gejala cukup menarik, yaitu walaupun terdapat salah satu kandidat yang berasal dari Kecamatan Belitang Hulu, namun tidak seluruh memilih calon kandidat yang berasal dari Kecamatan Belitang Hulu. Hal ini di faktorkan bukan hanyan menunjukan faktor yang primodialisme saja namun atas pertimbangan, seperti program dan kapasitas dari calon /kandidat. Dimensi konflik dalam voting pada masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu dipicu dari perbedaan arah dukungan politik dan kepentingan politik yang didasari garis kepartaian. Perbedaan pilihan politik masyarakat pada

Pemilihan Kepala Daerah seringkali memunculkan dimensi konflik. Jika perbedaan ini meruncing, maka akan terjadi pemisahan dalam masyarakat yang disebut celah politik (*political cleavage*) yaitu tantangan perilaku yang memisahkan masyarakat kedalam kelas-kelas politik yang memiliki pandangan yang berlawanan.

Adapun konflik yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu tidak terlalu menonjol, namun terjadi perselisihan antar mulut di kalangan tim-tim sukses. Berkaitan dengan tindak pada konflik Pilkada di Kabupaten Sekadau dapat kita analisis berdasarkan proses terbentuknya realitas sosial dalam masyarakat. Konflik merupakan sebuah realitas sosial yang pada skala kecil dianggap hal yang wajar dan diakui sebagai sebuah proses sosial yang dapat mengakibatkan perubahan sosial. Namun bila telah sampai pada tingkat kekerasan dianggap sebagai yang tidak wajar. Pengalaman terhadap konflik-konflik yang terjadi menjadi pengetahuan dan realitas sosial mereka yang bisa direproduksi ataupun sebagai cadangan pengetahuan. Proses pemungutan suara pada Pilkada 2010 di Kabupaten Sekadau, secara umum berhasil. Kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan dan bentrokan antar pendukung kandidat, tidak terjadi. Hal ini terlihat dengan adanya pengamanan sukarela yang dilaksanakan oleh gabungan berbagai pendukung kandidat mengamankan jalannya pemungutan suara. Pada kondisi ini, para sukarelawan bersedia mengesampingkan perbedaan etnis, agama dan golongan. Preferensi politiknya untuk menjaga kelancaran pemungutan suara di berbagai TPS pada pada seluruh wilayah Kabupaten Sekadau.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sekadau Tahun 2010

2.1. Isu Putra Daerah

Putra Daerah adalah seorang yang memiliki garis keturunan murni dari daerah dimana dia dilahirkan tersebut, istilah Putra Daerah didasarkan pada ikatan primodial, kedekatan kultur, lokalitas, dan kejiwaan, dimana seorang "Putra Daerah" diasumsikan akan memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dibandingkan dengan orang "non Putra Daerah". Berangkat dari asumsi bahwa yang layak menyandang status Putra Daerah adalah orang yang memiliki garis keturunan murni dari daerah dimana dia dilahirkan, maka kembali lagi kita akan dihadapkan dengan status asli dan pendatang. Isu

putra daerah dalam pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari dampak dan pengalaman politik pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu adanya pola pelaksanaan dan pembinaan kekuasaan bersifat sentralistis sehingga berakibat pada penempatan dalam jabatan di organisasi pemerintahan daerah termasuk diantaranya jabatan kepala daerah. Penempatan jabatan kepala daerah pada masa Pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada kebijakan dan restu dari pemerintah pusat, kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan kontrol oleh presiden Soeharto ketika itu, termasuk terhadap pemilihan kepala daerah. Isu Putra Daerah berhembus manakala adanya ekspetasi dari sebagian masyarakat di daerah bahwa calon kepala daerah harus berasal dari daerah setempat karena mereka (Putra Daerah) dianggap mengerti tentang kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat setempat. Di samping itu, isu ini juga menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat yang kemudian mengharapkan masyarakat asli harus menjadi pemimpin dan pemain di wilayahnya sendiri dan bukan menjadi penonton.

Kekhawatiran sebagian dari etnis Dayak didasari atas munculnya fenomena bahwa masyarakat yang berasal dari etnis Jawa selama ini sudah mulai banyak memasuki jabatan struktural di birokrasi pemerintah daerah sehingga muncul kecemasan kalau kepala daerah tidak berasal dari kalangan mereka (Orang Pribumi) maka keberadaan mereka akan semakin berada di bawah bayang-bayang etnis Jawa sebagai pendatang. Menurut Peneliti, munculnya isu bahwa hanya putra daerah menjadi calon kepala daerah dalam pilkada adalah sesuatu yang kontraproduktif dan juga merupakan sesuatu yang bisa mencabik rajutan kebersamaan sebagai bangsa. Dalam konteks perundang-undangan tidak ada satupun norma atau aturan yang mengatur hal bahwa hanya putra daerah yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun pengaturan tentang norma yang kemudian diartikan secara keliru sebagai "Putra Daerah", sebenarnya dalam konteks sebagai bentuk *affirmative policy*, yaitu untuk mendorong dan memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Diskusi Putra Daerah versus Bukan Putra daerah boleh jadi penting tetapi bukan segalanya. Menurut peneliti, soal putra daerah atau bukan putra daerah sebetulnya perkara sekunder belaka. Sementara yang lebih primer adalah kelayakan kepemimpinan kandidat. Pemilih yang hanya menimbang "keaslian darah" sang kandidat berarti menjebak diri menjadi "pemilih primodial". Mereka belum menjadi "pemilih

rasional-kalkulatif”, yang menimbang perkara putra daerah dalam kaitan dengan kualitas kelayakan kepemimpinan sang kandidat.

Pemilih rasional-kalkulatif, sambil menimbang asal daerah kandidat, mempersoalkan: seberapa jauh kandidat terbukti memiliki pemahaman, pengetahuan dan empati yang layak terhadap persoalan-persoalan daerah, seberapa realitas dan menjanjikan rancangan program dan kebijakan-kebijakan yang ditawarkannya, seberapa jauh pula ia bisa dipercaya terutama diikaitkan dengan rekam jejak karir politik dan ekonominya, adakah jejak korupsi (politik dan/ekonomi) dalam karir itu, seberapa besar kemauan dan komitmen kandidat untuk bekerja keras dan menyediakan seluruh waktunya sebagai pemimpin daerah, seberapa mampu ia membangun kepemimpinan kolektif yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

2.2. *Incumbent*

Dalam Pilkada langsung, terdapat kecenderungan *incumbent* terpilih kembali (menang). Kemenangan para *incumbent* tidak mengejutkan banyak kalangan, malah sudah diperkirakan sebelumnya. Jauh sebelum Pilkada berlangsung, kalangan pengamat politik maupun masyarakat umum sudah berani memastikan para mantan pejabat lama yang ikut maju dalam Pilkada akan menang. Kemenangan *incumbent* antara lain karena faktor popularitas dan penguasaan opini publik. Kemampuan para *incumbent* menaikkan citra dirinya tidak terlepas dari kelihaihan mereka ‘menguasai’ media massa. Mereka, misalnya, selama masa kampanye mereka lihai menciptakan isu yang menarik perhatian media, sehingga mendapat publikasi kampanye luas. Upaya ‘menjual diri’ melalui iklan *advertorial* juga gencar mereka lakukan. *Incumbent* tidak perlu mengagendakan acara sosialisasi atau perkenalan, *incumbent* telah membangun dan memiliki jaringan ke seluruh pelosok desa/kelurahan, terlebih apabila saat memimpin ia sudah memiliki niatan mencalonkan diri kembali. Investasi untuk menarik simpati senantiasa dicurahkan pada setiap momen. Setiap kunjungan kedinasan menjadi ‘fasilitas gratis’ untuk menanamkan simpati massa. Kucuran bantuan yang notabene berasal dari pemerintah, secara psikologis merekatkan hubungan emosional *incumbent* dengan konstituen. Misalnya, penyerahan SK kenaikan pangkat atau penyaluran kredit dengan bunga ringan yang dilakukan *incumbent* saat menjabat, pasti melahirkan suasana psikologis tersendiri bagi penerimaanya.

Begitu juga dengan peresmian rumah sakit, gedung/kantor, pondok pesantren, perusahaan milik pemerintah/swasta, lapangan olahraga, jalan, pembukaan seminar dan lokakarya, dan peresmian program-program pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat, akan menumbuhkan citra positif sang pemimpin di mata rakyat. Terhadap berbagai gerakan menanamkan simpati massa yang dilakukan para penantangya, *incumbent* sudah barang tentu mudah menghapus citra para pendatang baru. Jaringan kerja sampai pelosok desa yang sudah dimilikinya, menjadi sumber informasi handal yang dengan lincah mengakses gerakan para penantang. Besar kemungkinan, jika pada satu saat ada ‘pendatang baru’ memberikan bantuan entah dalam bentuk apa saja ke suatu tempat tertentu, di saat yang lain *incumbent* akan memberikan bantuan yang besarnya dua atau tiga kali lipat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa;(a), Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu melalui Kampanye Selama proses kampanye, keterlibatan aktif tidak hanya ditunjukkan oleh tim kampanye dari kandidat dan partai politik pendukung saja, tetapi juga dari kalangan masyarakat yang secara sukarela ikut terlibat langsung dalam proses kampanye tersebut. Dalam masa kampanye ini muncul fenomena pembentukan tim kampanye yang bertujuan untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon Bupati dan calon wakil bupati. Setiap masing-masing pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tim kampanye, kegunaan dari tim kampanye ini yaitu untuk mensukseskan kegiatan kampanye Pilkada. Tim kampanye merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyusun dan menjalankan strategi dalam rangka pemenangan pasangan calon. (b) Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu melalui Aktivitas Komunal Aktivitas komunal pada dasarnya merupakan tindakan politik yang dikembangkan melalui masyarakat yang ikut berpartisipasi langsung maupun aktif atau tidak aktif sebagai tim sukses salah satu calon kandidat. Pada masyarakat Kecamatan Belitang Hulu aktivitas komunal yang dilakukan masyarakat sangat efektif seperti melakukan mobilisasi masa untuk mendukung calon kandidat yang mereka anggap dapat menampung aspirasi masyarakat. (c) Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu Melalui Kontak Individu Kontak individu merupakan salah

satu bentuk lobi politik untuk mempengaruhi tokoh atau meminta tokoh yang bersangkutan untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat. Bentuk kontak individu kandidat atau partisipan dengan para tokoh ini, dilakukan secara langsung atau melalui jejaring politik atau kekeluargaan. Pada pemilihan kepala daerah Sekadau 2010, kontak individu yang dipakai untuk mendukung salah satu kandidat antara lain, tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh akademisi, dimana mereka dikontak secara langsung oleh semua kandidat karena dianggap kompeten dan berpengaruh dikalangan masyarakat. (d), Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Belitang Hulu Melalui Voting. Partisipasi politik masyarakat yang paling rendah adalah bentuk partisipasi voting atau pemberian suara karena hanya menuntut keterlibatan minimal dari partisipan. Dalam melaksanakan voting yang bersifat sangat individual ini, pemilihan masyarakat Kecamatan Belitang Hulu datang ke TPS-TPS secara sukarela, mereka memilih berdasarkan penilaian-penilaian objektif melalui proses yang panjang dengan mengikuti kegiatan kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh kandidat, tim kampanye, tokoh masyarakat. (e) *incumbent* didasari adanya faktor popularitas dan penguasaan opini publik. Kemampuan para *incumbent* menaikkan citra dirinya tidak terlepas dari kelihaihan mereka 'menguasai' media massa. (f) Faktor Isu Putra Daerah dihembuskan manakala adanya ekspektasi dari sebagian masyarakat di daerah bahwa calon kepala daerah harus berasal dari daerah setempat karena mereka (Putra Daerah) dianggap mengerti tentang kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat setempat.

2. Saran

Saran yang diharapkan berguna peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Belitang Hulu dalam Pilkada 2010, terdapat saran yang ingin disampaikan peneliti dalam bentuk saran teoritis dan saran praktis. Peneliti telah menemukan berbagai faktor yang mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Belitang Hulu. Kajian tentang partisipasi politik kerap hanya dikaitkan dengan faktor-faktor formal saja, seperti pendidikan politik, kesadaran politik, dan budaya politik, padahal sebenarnya kajian partisipasi politik juga harus mempertimbangkan aspek efektif, emosional, dan tradisional, seperti sistem kepercayaan dan nilai primordialisme yang erat berkaitan dengan etnisitas. Landasan demokrasi menjadi suatu bangunan yang kokoh dalam upaya mempersatukan Indonesia yang

bersifat multi-etnis. Terlebih, sentimen etnis hanya dapat memperparah proses transisi demokrasi di Indonesia, sehingga kekhawatiran terjadinya *frozen democracy* tidak terjadi di Indonesia. Pilkada merupakan sebagai ajang melahirkan penguasa-penguasa baru di tingkat lokal yang tidak hanya memunculkan konflik kepentingan dan konflik hubungan, akan tetapi mampu membangunkan dan menciptakan kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor mendewasakan masyarakat dalam upaya memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah, dengan demikian pendidikan harus dipakai sebagai sarana dalam menjapai kesejahteraan bersama. Kedepannya masyarakat di kecamatan Belitang Hulu merasakan hasil-hasil pembangunan yang disentralisasikan dengan bertumpu pada optimis potensi lokal yang dimiliki daerah. Oleh karena itu untuk peningkatan kualitas Pilkada, perlu adanya konsolidasi diantara elit politik untuk terlibat secara bersama-sama bekerja dalam keragaman memajukan daerah demi terciptanya pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.

F. REFERENSI

- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: yayasan Obor.
- Clagget, William and Philip Pollock III. 2006. *The Modes of Participation revisited, dalam Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 4, University of Utah: Sage Publications.*
- Dan, Nimmo. 1970. *The Political Persuader*, New York: Prentice-Hall, Engliwood Cliffs
- Djokosukarto, Agung 2003 , *dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung*: Pustaka Pelajar
- Goldstein, Kenneth and Travis Ridont 2002. *The Politics of Participation: Mobilitation and Turnout Over Time*. Deep Political behavior Vol.24 No. 1. Canada: Pringer.
- Huntington, Samuel P. dan Juan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Raneka Cipta.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Verba, Sidney and Norman H.Nie . 1972.
Participation in America. New Yorok:
Harper and Row.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*.
Jakarta: Grasindo.

Roger and Storey. 1987. *Communication campaigns*.
New York: Palgrave .

Scammon, Richard M. 1967. *Electoral Participation,
and Annals of the American Academy of
political and social science*, Vol. 371, Sage
Publication

Prihatmoko, J. Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah
Langsung*: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Purwoko, Bambang, 2005, *Isu-Isu Strategis Pilkada
Langsung; Ekspresi Kedaulatan Untuk
Kesejahteraan Rakyat*, di dalam Jurnal Ilmu
Politik dan Pembangunan, Volume 6 No. 1
April 2005, Laboratorium Ilmu Politik FISIP
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan
Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Fransiskus
NIM / Periode lulus : E02109001/2013/2014
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/IA
E-mail address/HP : manypatih@yahoo.co.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Asyrisani (*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Baktang Hulu Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sekadau Tahun 2010

Leserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 11 Feb 2014
Dr. H. H. Hadari Nawawi, S.P. M.S.
NIP. 19691222002121002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 11-02-2014
Fransiskus
(Fransiskus)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).